

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini mewujudkan pemerintah yang baik menjadi suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi keberadaanya dan mutlak terpenuhi. Dalam kinerja pemerintahan, laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah tersebut selama tahun anggaran yang bersangkutan. Selain pemerintah pusat yang membuat laporan keuangan, pemerintah daerah, kota, atau provinsi beserta seluruh badan dinas dan instansi pun harus mampu membuat laporan keuangan.

Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan tentunya dipengaruhi oleh bermacam Faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu salah satunya pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah.

Faktor yang pertama pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintah. Menurut Wilkinson (2010) mengatakan pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk pengelolaan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan

bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Dalam Penjelasan Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif kualitas laporan, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Faktor yang kedua yang turut mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Sistem akan berjalan dengan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka perlu adanya pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat

menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001 dalam Fikri, 2011).

Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Dari kedua faktor tersebut tentu memiliki hubungan yang sangat erat keterkaitannya, diberbagai macam tempat telah dilakukan penelitian tentang bagaimana kedua variabel tersebut mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Menurut penelitian Artana (2016), bahwa kualitas laporan keuangan itu dipengaruhi oleh variabel pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah, berdasarkan hasil temuannya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan pengawasan keuangan daerah berkompetensi dan independensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan. Hal yang berbeda dijelaskan oleh Sartika (2019), bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh internal dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan pengawasan tidak terdapat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun dalam penelitian, Haza (2020) yang berjudul Pengaruh pemanfaatan teknologi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan riset gap atau temuan penelitian di atas maka saya tertarik untuk meneliti di Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, dimana Kabupaten Kupang sendiri berlokasi di Oelamasi mulai 22 Oktober 2010, setelah sebelumnya berlokasi di kota kupang sejak 1958. Dimana kabupaten kupang masih berbenah dalam kualitas laporannya. Sebagai data awal penelitian ini, penulis akan menampilkan Opini BPK-RI yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang. Pada Tahun 2018-2020 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang diaudit oleh BPK-RI dan memberikan Opini Sebagai Berikut:

Tabel 1.1
Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang
Tahun Anggaran 2018-2020

No	Tahun	Opini Audit BPK-RI
1	2018	Wajar Dengan Pengecualian
2	2019	Wajar Dengan Pengecualian
3	2020	Wajar Dengan Pengecualian

Sumber: BPPAKD Provinsi NTT 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas pemerintah daerah kabupaten kupang meraih predikat Wajar dengan Pengecualian pada tahun 2018-2020 dalam laporan keuangan dengan paragraph penjelas.

Pada Tahun 2018 yang menjadi pengecualian atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun anggaran 2018 yaitu Pengelolaan, penatausahaan dan penyajian Aset Tetap yaitu kegiatan inventarisasi aset tetap belum memadai dan belum didukung dokumentasi yang cukup. Kegiatan perencanaan, pengawasan, pemeliharaan dan peningkatan aset dengan total belanja senilai Rp 402,04 Miliar belum diatribusikan sebagai penambah pada aset induk namun dicatat sebagai aset baru.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang masih menyandang Predikat WDP dengan permasalahan yaitu Ketidak tersedianya informasi pada perangkat daerah terkait mengenai bukti pemeriksaan yang cukup serta Penendalian dan penatausahaan aset tetap tanah dan gedung bangunan belum sepenuhnya memadai. Aset dari hibah pemerintah pusat pada dinas pendidikan dan kebudayaan tahun 2016-2019 senilai Rp 18,31 belum di catat pada Laporan Keuangan.

Pada Tahun 2020 juga masih sama Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang masih menyandang predikat WDP dengan permasalahan yang sama mengenai aset tetap serta lemahnya pengendalian intern yang signifikan atas penatausahaan dan penyajian. Aplikasi berbasis teknologi yang belum

sepenuhnya mendukung pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan.

Sehingga dalam penelitian ini penulis mengkhususkan pada 7 OPD yaitu Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan, Daerah, Inspektorat Daerah, dan Bagian Tata Pemerintahan dalam lingkup pemerintah daerah kabupaten kupang yang berhubungan langsung dengan uraian masalah pada tahun 2018-2020.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis sangat tertarik untuk membahas dan menganalisanya dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kupang?
2. Apakah pengawasan pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kupang?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kupang
2. pengawasan pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kupang.
3. Untuk mendeskripsikan Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan, yakni:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kupang
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Bagi Universitas
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Sebagai bahan referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini.